

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Sri Dewi Indrjati, MM

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi  
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681124 199310 2 00 1

Pihak Pertama

Kepala Bidang Kesetaraan  
Gender dan Perlindungan  
Perempuan

Dra. Sri Dewi Indrjati MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670128 198603 2 00 2

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

| No  | Sasaran Program                             | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    |
| 1.  | Meningkatkan cakupan program PPEP di daerah | Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan | 65 %   |
| 2   | Perlindungan Perempuan                      | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar  | 20 %   |
| 3   | Peningkatan Kualitas Keluarga               | Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar   | 20 %   |

| Program  | Anggaran         | Keterangan |
|--|------------------|------------|
| 1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Rp 1.000.000.000 | APBD       |
| 2. Perlindungan Perempuan                            | Rp 1.177.880.000 | APBD       |
| 3. Peningkatan Kualitas Keluarga                     | Rp 100.000.000   | APBD       |


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Provinsi Jawa Tengah

  
Dra. Retno Sudewi Apt,M.Si.MM

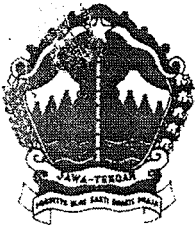
Pembina Utama Madya  
NIP. 19681124 199310 2 00 1

Semarang, 10 Januari 2025

Kepala Bidang  
Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

  
Dra. Sri Dewi Indrajati MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 19670128 198603 2 00 2



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melati Diah Pamungkas, SE,MM

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan Gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Sri Dewi Indrajati MM

Jabatan : Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan  
Perlindungan Perempuan

Dra. Sri Dewi Indrajati, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670128 198603 2 00 2

Pihak Pertama  
Ketua Kelompok Kerja  
Kesetaraan Gender

Melati Diah Pamungkas, SE,MM

Penata Tingkat I

NIP. 19850516 200901 2 010

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

| No  | Sasaran Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target      |
|-----|--|---|-------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)         |
| 1   | <b>Meningkatnya OPD yang menganggarkan ARG</b>   | <b>Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi</b>   | <b>10 %</b> |
| 1.1 | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)                | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi   | 2 Laporan   |
| 1.2 | Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG   | 50 Dokumen  |
| 1.3 | Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG                                | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi   | 25 Orang    |
| 2   | <b>Meningkatnya pemahaman perempuan dalam bidang politik dan ekonomi</b>                         | <b>Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya</b>                   | <b>75 %</b> |
| 2.1 | Meningkatnya pemahaman perempuan tentang pendidikan politik                                      | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan | 1.280 Orang |

|     |  |   |              |
|-----|--|---|--------------|
|     |  | partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi  |              |
| 2.2 | Meningkatnya kesejahteraan perempuan rentan                                  | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 3 Kelompok   |
| 3   | <b>Meningkatnya layanan keluarga yang responsif gender dan anak</b>          | <b>Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak</b>   | <b>100 %</b> |
| 3.1 | Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pewujudan KG dan perlindungan anak | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota  | 10 OPD       |

| Sub Kegiatan  | Anggaran   | Keterangan |
|---|------------|------------|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Rp Kewenangan Provinsi | 25.000.000 | APBD       |

|   |    |             |      |
|---|----|-------------|------|
| 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi  | Rp | 30.000.000  | APBD |
| 3. Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi  | Rp | 25.000.000  | APBD |
| 4. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                      | Rp | 880.000.000 | APBD |
| 5. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  | Rp | 40.000.000  | APBD |
| 6. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Rp | 60.000.000  | APBD |

Semarang, 01 Januari 2025

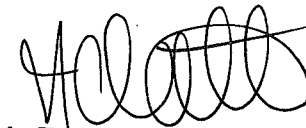
Kepala Bidang  
Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Dra. Sri Dewi Indrajati, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670128 198603 2 00 2

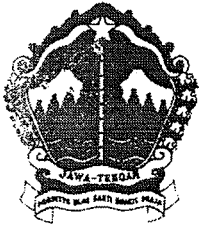
Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan Gender



Melati Diah Pamungkas, SE, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19850516 200901 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536  
e-mail : dppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan Dinas  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Sri Dewi Indrajati MM

Jabatan : Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Kualitas Hidup dan  
Perlindungan Perempuan

Dra. Sri Dewi Indrajati, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670128 198603 2 00 2

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan

Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi

Pembina

NIP. 19720814 1999012 001

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

| No  | Sasaran Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target             |
|-----|--|--|--------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)                |
| 1   | <b>Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada perempuan</b>  | <b>Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan</b>   | <b>52 %</b>        |
| 1.1 | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen          |
| 2.2 | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                       | 1 OPD              |
| 2   | <b>Meningkatnya kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan</b>  | <b>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya</b>  | <b>12 Kelompok</b> |

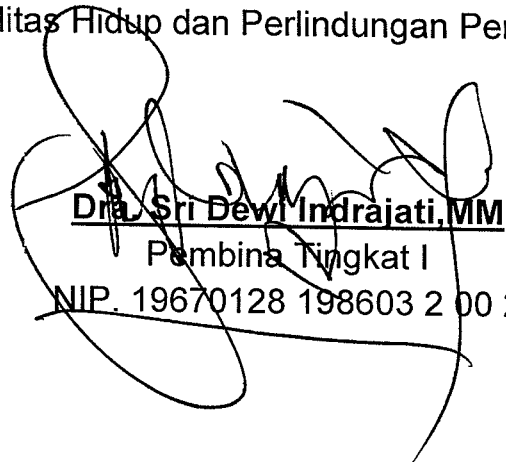
|     |  |  |           |
|-----|--|--|-----------|
| 2.1 | Meningkatnya kab/kota yang didampingi penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan | Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi         | 1 Dokumen |
| 2.2 | Meningkatnya pemahaman peserta lembaga penyedia layanan kekerasan pada perempuan         | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas      | 10 Orang  |
| 2.3 | Meningkatnya kegiatan bagi perempuan dalam situasi darurat                               | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik                        | 25 Orang  |
| 2.4 | Meningkatnya kab/kota yang didampingi penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 3 Dokumen |

| Sub Kegiatan   | Anggaran      | Keterangan    |
|--|---------------|---------------|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Rp 80.750.000 | DAK- NF       |
| 2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi  | Rp 50.000.000 | APBD          |
| 3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi         | Rp 50.000.000 | APBD          |
| 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           | Rp 69.020.000 | APBD & DAK-NF |
| 5. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi                           | Rp 15.000.000 | APBD          |

6. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Rp 748.000.000 APBD  
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas  
Daerah Kabupaten/Kota

Semarang, 10 Januari 2025

Kepala Bidang  
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan



Dra. Sri Dewi Indrajati, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670128 198603 2 00 2

Ketua Kelompok Kerja  
Perlindungan Perempuan



Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi  
Pembina  
NIP. 19720814 1999012 001